

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Lahirnya paket Undang-undang (UU) bidang keuangan negara banyak memberikan perubahan konsepsi dari administrasi keuangan menuju akuntansi keuangan. Hampir empat belas tahun sejak otonomi daerah diterapkan awal tahun 1999, instansi pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) dirasa masih belum cukup mumpuni menyusun laporan keuangan yang berkualitas seperti halnya sektor swasta. Padahal kualitas laporan keuangan merupakan faktor penting bagi sebuah instansi, baik instansi swasta maupun pemerintah untuk menunjukkan kinerja sebuah instansi dalam mengelola finansial mereka. Laporan keuangan yang berkualitas mampu memberikan nilai guna bagi para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomis. Namun peningkatan nilai guna laporan keuangan tersebut harus didukung oleh kompetensi pengelola keuangan instansi (Almaidah, 2014).

Pengelolaan keuangan instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Mahmud (2007) entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau

lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan entitas pelaporan. Selaku entitas akuntansi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki pegawai bagian keuangan yang terdiri dari Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK OPD). PPK OPD bertugas menyiapkan laporan keuangan OPD untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah selaku entitas pelaporan. Komang dkk. (2015) menyatakan sistem pelaporan di Indonesia masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan itu sendiri. Salah satu faktor penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah menyangkut etika dan sikap positif akuntan itu sendiri.

Menurut Harahap (2011) etika adalah disiplin ilmu yang berasal dari filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang mengarahkan manusia pada perilaku hidupnya. Etika memberikan ruang untuk melakukan kajian dan analisis kritis terhadap nilai dan norma moral. Etika adalah refleksi kritis dan rasional terhadap nilai dan norma moral yang mengatur perilaku hidup manusia baik pribadi maupun kelompok. Etika sangat menarik untuk dibicarakan mengingat banyaknya praktik-praktik pelanggaran etika penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh seorang akuntan, baik akuntan publik, akuntan pemerintah, maupun akuntan intern perusahaan.

Etika penyusunan laporan keuangan merupakan prinsip dasar yang digunakan dalam memulai menyusun laporan keuangan. Penyusun laporan keuangan harus memperhatikan kualitas laporan keuangan karena akan dipergunakan sebagai data pokok menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Etika dan sikap positif akuntan Indonesia merupakan salah satu faktor untuk mencapai peningkatan dari kualitas pelaporan keuangan (Yulianti dan Fitriany, 2005). Etika penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan 4 (empat) perilaku yaitu salah saji, pengungkapan informasi yang sensitif, biaya dan manfaat serta tanggung jawab manager (Fannani, 2006 dalam Made, dkk 2014).

Perilaku atau sikap pegawai yang professional akan mampu menghadapi tekanan yang muncul dari dirinya sendiri ataupun dari pihak eksternal, dimana kemampuan seorang pegawai untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan etika juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seorang pegawai adalah tingkat pendidikan. Menurut data Kepegawaian dari Badan Pusat Statistik (2014) menyatakan bahwa kepegawaian dari masing-masing OPD Madiun memiliki tingkat penyebaran pendidikan yang beragam. Daerah yang memiliki penyebaran tingkat pendidikan sampai dengan SMA/Sederajat dalam etika penyusunan laporan keuangan untuk memunculkan sikap profesionalisme dan pemahaman beretika akan lebih rendah dari daerah yang memiliki penyebaran tingkat pendidikan yang lengkap.

Etika penyusunan laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pegawai, melainkan dapat didukung dengan komitmen organisasi dan budaya dalam organisasi. Menurut Pratini, dkk (2016) komitmen organisasi adalah keinginan tentang keteraturan sikap karyawan terhadap institusi tempat mereka bekerja dan tahapan-tahapan yang berlaku secara kontinyu dimana anggota institusi menyatakan perhatian mereka terhadap kebaikan dan kesuksesan institusi selanjutnya. Semakin kuat komitmen, semakin kuat kecenderungan seseorang untuk diarahkan pada tindakan sesuai dengan standar. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi lebih baik.

Selain komitmen organisasi, dalam penelitian ini menggunakan variabel budaya organisasi. Budaya organisasi menurut Moeljono (2005) adalah sistem nilai-nilai yang diyakini semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Budaya organisasi yang kuat dapat menciptakan suatu ikatan antara perusahaan dan para karyawan. Komitmen organisasi yang tinggi dan budaya organisasi yang kuat apabila benar-benar dimiliki oleh pegawai di masing-masing OPD hal tersebut akan menguatkan sejumlah tingkat pendidikan yang masuk kedalam kepegawaian masing-masing OPD yang nantinya akan menambah kemampuan dalam etika penyusunan laporan keuangan.

Berbagai penelitian terkait dengan etika pelaporan keuangan telah dilakukan dengan berbagai kesimpulan diantaranya Made (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Ditunjukkan dengan pandangan mahasiswa jurusan akuntansi program S1 lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa jurusan akuntansi program diploma 3 terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Mahmud (2007) dalam penelitiannya menunjukkan tidak terdapat perbedaan persepsi mahasiswa mengenai etika penyusunan laporan keuangan antara mahasiswa tingkat atas dan tingkat bawah. Komang, Dkk (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara persepsi akuntan pendidik dengan mahasiswa S1/D4 akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena akuntan pendidik memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan salah saji dibandingkan mahasiswa S1/D4.

Penelitian yang terkait dengan komitmen organisasi dan budaya organisasi telah dilakukan dengan berbagai kesimpulan diantaranya Pratini (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa komitmen organisasi sebagai pemoderasi dan memperlemah pengaruh penganggaran partisipatif pada *budgetary slack*. Sholihah, Dkk (2015) menyimpulkan bahwa komitmen tidak dapat meningkatkan keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja. Secara empiris budaya organisasi tidak dapat memperkuat pengaruh

kualitas sumber daya manusia dan komitmen terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terdapat pada sampel yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan sampel dari responden yang memiliki relevansi tingkat pendidikan dengan etika penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut berarti bahwa responden penelitian terdahulu hanya dari tingkat pendidikan tinggi, yang tentunya sudah memahami etika penyusunan laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian ini sampel yang digunakan memiliki tingkat pendidikan yang beragam untuk melihat relevansinya terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Sehingga perlu dianalisis keragaman tingkat pendidikan tersebut atas relevansinya dengan etika dalam menyusun laporan keuangan. Tingkat pendidikan yang beragam bila disandingkan dengan komitmen yang kuat dan budaya organisasi pada tempat bekerja sangat bagus tentunya akan memberikan pengaruh lebih baik terhadap etika penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan berbagai persoalan dan perbedaan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan serta fenomena yang terjadi di Kabupaten Madiun yaitu banyaknya iklan di media social dan banner yang terpasang di jalan raya yang berupa ucapan terima kasih atas diperolehnya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI untuk laporan keuangan daerah, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **Persepsi Pegawai atas Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Etika Penyusunan Laporan**

**Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi  
Sebagai Variabel *Moderating* (study empiris OPD Kabupaten Madiun).**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pendidikan berpengaruh terhadap etika penyusunan laporan keuangan daerah ?
2. Bagaimana komitmen organisasi berpengaruh terhadap etika penyusunan laporan keuangan daerah ?
3. Bagaimana budaya organisasi berpengaruh terhadap etika penyusunan laporan keuangan daerah ?
4. Bagaimana hubungan tingkat pendidikan dengan etika penyusunan laporan keuangan daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel *moderating*?
5. Bagaimana hubungan tingkat pendidikan dengan etika penyusunan laporan keuangan daerah dengan budaya organisasi sebagai variabel *moderating* ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap etika penyusunan laporan keuangan daerah.

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap etika penyusunan laporan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap etika penyusunan laporan keuangan daerah.
4. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan etika penyusunan laporan keuangan daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel *moderating*.
5. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan etika penyusunan laporan keuangan daerah dengan budaya organisasi sebagai variabel *moderating*.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini:

a. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah pustaka dan dapat menambah pengetahuan mengenai pelaporan keuangan beserta berbagai aspek yang menyertainya termasuk mengenai etika penyampaian pelaporan keuangannya.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka membangun pemahaman pegawai khususnya yang bekerja dalam menyusun laporan keuangan kaitannya dengan penguatan moral dan etika akuntan.

2) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam rangka menakar kapasitas pegawai sebagai dasar pembangunan kualitas sumber daya pegawai yang bersangkutan sehingga dapat diambil kebijakan yang terbaik dalam meningkatkan kualitas.

c. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang etika penyusunan laporan keuangan daerah khususnya dalam penyampaian laporan keuangan secara umum.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi maupun kajian bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pembahasan pada bidang ini dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan.

